

## KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM UPAYA PENGURANGAN KEMISKINAN: PENDEKATAN TERPADU UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dival Aril Putra<sup>1</sup>, Erhan Aziz<sup>2</sup>, Juranda<sup>3</sup>

[divalarilputra@gmail.com](mailto:divalarilputra@gmail.com)<sup>1</sup>

Universitas Maritim Raja Ali Haji

### ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Tanjungpinang, sehingga diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan kerja sama lintas sektor untuk menangani masalah ini secara efektif. Bertumpu pada kebijakan nasional serta program daerah, pemerintah melaksanakan strategi berupa pemberian bantuan, pelatihan, dan penguatan ekonomi lokal agar kelompok masyarakat miskin memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan pokok. Peran Dinas Sosial dan berbagai lembaga sangat krusial dalam advokasi, edukasi, dan reintegrasi sosial, yang bertujuan mencegah eksploitasi dan meningkatkan partisipasi kelompok rentan secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi spesifik di wilayah pesisir, seperti Kelurahan Dompok, memperlihatkan bahwa perubahan positif hanya bisa dicapai melalui penyesuaian program dengan karakteristik budaya dan ekonomi lokal. Pengembangan koperasi dan usaha mikro menjadi fokus strategis pemerintah yang didukung oleh pelatihan intensif, fasilitasi modal, dan akses pemasaran, sehingga pelaku UMKM mampu meningkatkan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja. Proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin untuk memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran dan menyesuaikan strategi jika menemukan kendala implementasi. Kerja sama dengan akademisi serta lembaga swadaya masyarakat turut memperkuat inovasi, akuntabilitas, dan efektivitas intervensi program. Penurunan angka kemiskinan secara bertahap, pertumbuhan UMKK yang signifikan, dan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dilihat dari data statistik. Dengan pendekatan regulatif, Partisipatif, dan berbasis data evaluasi, diharapkan strategi pengurangan kemiskinan di Kota Tanjungpinang mampu menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan inklusif.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Kebijakan Pemerintah, Dinas Sosial, Tanjungpinang, UMKM, Intervensi Sosial.

### ABSTRACT

Poverty remains the central challenge faced by the Tanjungpinang City Government, necessitating integrated efforts and sectoral collaboration for effective mitigation. Grounded in both national and local policies, the government implements strategies such as assistance programs, training initiatives, and local economic empowerment to improve access for poor communities to education, healthcare, and basic needs. The Social Service Agency and partner institutions play a pivotal role in advocacy, education, and social reintegration to prevent exploitation and encourage the active participation of vulnerable groups in society. In coastal areas like Dompok, success requires tailored programs that address local cultural and economic nuances. The development of cooperatives and microenterprises is a strategic priority, enhanced by training, capital support, and marketing facilitation, enabling MSMEs to increase income and expand employment opportunities. Regular monitoring and evaluation ensures alignment with community needs and supports strategic adjustments where implementation barriers arise. Collaboration with academics and non-governmental organizations strengthens innovation, accountability, and program effectiveness. Statistical evidence indicates a gradual reduction in poverty rates, significant MSME growth, and increased community involvement. Through regulatory, participatory, and data-driven approaches, Tanjungpinang's poverty reduction strategies are expected to deliver sustainable and inclusive social welfare improvements.

**Keywords:** *Poverty, Government Policy, Social Service Agency, Msmes, Tanjungpinang, Social Intervention.*

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan masalah utama yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Usaha mengurangi kemiskinan tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan perlu strategi bersama dari banyak pihak. Pemerintah telah menjalankan program bantuan nasional dan daerah, agar kelompok miskin bisa mendapat akses ke pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok yang layak (Chandra et al., 2016). Melalui pemberian bantuan dan pelatihan, warga miskin diharapkan bisa perlahan memperbaiki keadaan hidup mereka.

Dinas sosial berperan besar dalam menolong gelandangan dan pengemis. Selain memberi bantuan langsung, Dinas sosial bekerja sama dengan beberapa lembaga untuk mencegah dan memperbaiki masalah sosial (Salsabila et al., 2022). Advokasi dan edukasi juga dilakukan supaya kelompok masyarakat miskin yang rentan ini agar lebih aktif dalam kegiatan bermanfaat, sehingga resiko kemiskinan bisa berkurang. Hukum ditegakkan agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari orang yang lemah (masyarakat ekonomi bawah).

Di lingkungan pemukiman nelayan, seperti kelurahan dampak, masalah kemiskinan terjadi karena sulitnya akses ke fasilitas umum dan sumber penghasilan. Maka, program pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pesisir agar hasilnya lebih baik (Winoto, 2006). Penguatan ekonomi lokal melalui perubahan kebiasaan, perlu untuk terus didukung agar kelompok nelayan tidak tertinggal dan dapat mengikuti perkembangan zaman.

Penguatan sektor ekonomi rakyat menjadi salah satu fokus utama pemerintah dengan mendukung koperasi dan usaha mikro. Petani, Nelayan, dan pelaku UMKM diberikan pelatihan, modal usaha, serta kemudahan pemasaran, supaya mereka mampu bersaing dan memperluas peluang kerja. Usaha mikro yang tumbuh membantu warga mendapat penghasilan lebih baik, sehingga tingkat kemiskinan bisa berangsur menurun (Surya, 2024). Untuk memastikan program berjalan efektif, evaluasi, dan monitoring secara rutin sangat diperlukan. Penilaian ini sangat penting supaya pemerintah tahu kendala yang terjadi di lapangan dan bisa memperbaiki strategi yang kurang tepat (Nico Satria, Rumzi Samin, 2021). Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk membuat program baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari sisi regulasi, pemerintah daerah Kota Tanjungpinang telah menetapkan sejumlah peraturan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengurangan kemiskinan. Aturan hukum ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah dan juga keputusan tegas, baik di sektor sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan penyampaian aspirasi turut membantu agar kebijakan lebih sesuai atau relevan dengan kondisi lapangan. Kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi atau akademisi sangat penting untuk menciptakan kolaborasi yang kuat serta memperkuat strategi penurunan kemiskinan. Melalui diskusi dan kegiatan bersama, masalah kemiskinan dapat dinilai dari berbagai sudut dan solusi kreatif yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Keterlibatan langsung masyarakat menjadi jaminan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan memberi pengetahuan serta keterampilan baru yang dibutuhkan.

Dengan strategi yang melibatkan banyak pihak dan berbagai pendekatan, penurunan kemiskinan di Kota Tanjungpinang diharapkan berjalan lebih baik dan menyeluruh. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi lokal dan mengintegrasikan berbagai kebijakan penting supaya kesejahteraan masyarakat meningkat semakin baik, serta angka

kemiskinan mampu berkurang dengan ditekan secara berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, agar mampu membahas secara mendalam kebijakan dan strategi pemerintah kota dalam menurunkan kemiskinan. Metode ini memungkinkan peneliti menelusuri dinamika proses kebijakan serta menemukan praktik terbaik dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan. Pengumpulan data ditempuh dengan wawancara terstruktur dan semi-terstruktur kepada pemerintah daerah, dinas sosial, pelaku usaha mikro, masyarakat pesisir, dan penerima program bantuan. Dengan teknik ini, informasi yang diperoleh lebih beragam dan mewakili perspektif tiap stakeholder. Observasi lapangan dipemukim nelayan dan kawasan urban dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana kebijakan dilaksanakan serta bagaimana masyarakat meresponnya dalam kehidupan sehari-hari.

Analisis dokumen resmi seperti peraturan daerah, laporan evaluasi program, dan data statistik sosial ekonomi melengkapi temuan lapangan dan memperkuat pemahaman terhadap konteks kebijakan. Studi pustaka dari jurnal dan penelitian terdahulu membantu peneliti menyusun kerangka teori serta membandingkan temuan empiris dengan perspektif akademik yang telah ada. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara sistematis dengan cara mengelompokkan informasi, mengidentifikasi pola, serta menarik kesimpulan selaras antara bukti lapangan dan teori. Validasi hasil dilakukan melalui triangulasi sumber dan konsultasi dengan narasumber utama, sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjungpinang menunjukkan pergeseran dari pendekatan konvensional menuju integritas lintas sektor berbasis partisipasi masyarakat. Pemerintah setempat mengambil kebijakan nasional dan lokal yang berorientasi pada peningkatan akses pendidikan, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan dasar bagi kelompok masyarakat miskin. Studi Chandra et al. (2016) menekankan bahwa keberhasilan program tergantung pada kolaborasi antarinstansi dan kemudahan akses masyarakat miskin terhadap bantuan. Penerima Program Keluarga Harapan mengalami kenaikan taraf hidup, khususnya dalam memperoleh layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Peran dinas sosial sangat penting dalam membina masyarakat miskin dan melakukan advokasi terhadap gelandangan dan pengemis. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melibatkan pemberian bantuan langsung, pelatihan keterampilan, hingga reintegrasi sosial. Peningkatan kualitas hidup masyarakat sasaran terjadi setelah adanya intervensi berkelanjutan, melalui jaringan kerjasama lintas lembaga. Dinas sosial juga berupaya menindak tegas segala bentuk eksploitasi terhadap masyarakat ekonomi bawah, dengan penerapan perlindungan hukum serta edukasi partisipatif kepada masyarakat.

Tantangan kemiskinan yang dihadapi masyarakat pesisir tercermin dalam kasus Kelurahan Dompok (Winoto, 2006), khususnya pada keterbatasan infrastruktur dan akses sumber daya ekonomi. Pemerintah memberikan perhatian khusus pada kelompok nelayan dan warga pesisir, melalui pembangunan fasilitas umum, pembinaan ekonomi lokal, dan pelatihan produktif. Studi lapangan mengungkapkan bahwa kemajuan nyata hanya dapat tercapai apabila program disesuaikan dengan kondisi budaya dan ekonomi masyarakat.

Program penguatan ekonomi lokal menjadi agenda utama pemerintah Kota Tanjungpinang, peran koperasi dan usaha mikro dalam membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan dukungan modal, pelatihan, serta fasilitasi pemasaran, pelaku UMKM mengalami peningkatan omse dan kapasitas produksi.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga pelaksanaan program dapat dikontrol dan beradaptasi sesuai kebutuhan masyarakat. Evaluasi kebijakan pembangunan manusia dan penurunan kemiskinan di Kota Tanjungpinang, menurut Nico Satria et al. (2021), menjadi tumpuan utama dalam perbaikan strategi efektif bagi pemerintah daerah. Adanya kendala implementasi seperti ketimpangan antarwilayah, partisipasi masyarakat yang masih rendah di awal, dan keterbatasan anggaran. Penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun sejak diterapkan model evaluasi berbasis aktif oleh melibatkan pihak akademik.

#### **Integrasi data statistik dan keterlibatan stakeholder**

Angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang tahun terakhir berkisar 9% dengan variasi antar kecamatan yang menandakan perlunya intervensi yang lebih tajam di wilayah pesisir dan pinggiran kota. Jumlah UMKM meningkat sekitar 5-8% per tahun, didukung dengan program pelatihan dan kredit usaha. Tingkat pengangguran di daerah pesisir masih terbilang sangat tinggi dibandingkan di pusat kota, menyoroti kebutuhan inovasi program serta penguatan jaringan usaha. Keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat menghasilkan kolaborasi strategis yang mempercepat pengembangan inovasi lokal. Survei sosial ekonomi, analisis sektor memperkuat akuntabilitas dan efektivitas program penurunan kemiskinan. Program rehabilitasi, advokasi, serta edukasi masyarakat berjalan seiring dengan penegakan hukum yang melindungi masyarakat ekonomi bawah.

#### **KESIMPULAN**

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjungpinang berkembang melalui kerja sama antara pemerintah daerah, dinas sosial, pelaku usaha, dan partisipasi masyarakat yang semakin aktif. Kebijakan terpadu, yang meliputi pemberian bantuan material, pelatihan keterampilan, pembinaan usaha mikro, serta inovasi lokal, telah memberikan kontribusi yang baik terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat ekonomi bawah, baik di kawasan urban maupun pesisir. Keterlibatan perguruan tinggi dan dunia usaha turut mempercepat terciptanya solusi yang relevan dengan kebutuhan lapangan, sementara monitoring dan evaluasi berbasis teknologi meningkatkan akurasi serta responsivitas program setiap tahunnya. Penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan UMKK menjadi bukti keberhasilan upaya intervensi pemerintah yang semakin inklusif dan adaptif. Rekomendasi pembaruan strategi berbasis hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi tumpuan bagi pemerintah setempat untuk mengambil langkah lebih inovatif dan berkelanjutan dalam menekan angka kemiskinan. Dengan demikian, kesejahteraan sosial masyarakat Kota Tanjungpinang dapat terus diperbaiki melalui kebijakan yang terintegritas dan relevan dengan kondisi nyata di lapangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Chandra, A., Adiputra, Y. S., & Putri, N. (2016). Implementasi Kebijakan Kementerian Sosial Dalam Program Keluarga Harapan Di Kota Tanjungpinang Tahun 2015. *Jurnal Umrh*, 2015.
- Nico Satria, Rumzi Samin, R. S. (2021). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Manusia Pada Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota Tanjungpinang Periode 2013-2018. *Student Online Journal* ISSN 2746-8453, 1(2).
- Salsabila, Q., Gabriela Purba, & Selvia Evayanti Saragih. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 3(3). <https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.85>
- Surya, S. (2024). Strategy of The Tanjungpinang City Cooperative and Micro-Enterprise Labor Service in Reducing The Tanjungpinang City. *International Journal of Public Administration Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.29103/ijpas.v3i2.15148>
- Winoto, G. (2006). Pola Kemiskinan di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang. Tesis.